

KEANDALAN KELOMPOK KOMUNITAS PENYELAMATAN AIR WADUK SERMO

¹⁾ Irwan, ²⁾ R. Pamekas

¹⁾ Pusat Litbang Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan

Jl. Sapta Taruna Raya No 26, Kompleks PU Pasar Jum'at, Jakarta 12310

²⁾ Pusat Litbang Permukiman, Jl Panyaungan Cileunyi Wetan Kabupaten Bandung

Email Korespondensi: irwankus@yahoo.com, rpamekas@gmail.com

ABSTRAK

Fenomena perubahan iklim dan pemanasan Global telah mengancam kelestarian penyediaan air baku bagi keperluan pengairan maupun air minum penduduk. Untuk mengantisipasi dampak kekeringan yang semakin meluas, pemerintah telah memiliki kebijakan pelestarian sumber sumber air yang dioperasionalkan melalui Gerakan Nasional Kemitraan Pelestarian Air (GNKPA). Namun, kebijakan tersebut tidak mungkin dapat dijalankan secara baik apabila tidak didukung oleh masyarakat yang peduli tentang kelestarian air. Penelitian ini ditujukan untuk memetakan kondisi dan potensi kelompok komunitas penyelamatan air di waduk Sermo Kabupaten Kulonprogo Daerah Istimewa Yogyakarta ditinjau dari aspek sosial-kelembagaan, sosial ekonomi, dan lingkungan. Penelitian ini menggunakan pendekatan Focus Group Discussion (FGD) yang diikuti 6 (enam) dari 9 (sembilan) kelompok komunitas waduk Sermo. Metode yang digunakan untuk analisis adalah metode kualitatif yang dikuantitatifkan dengan memberi bobot pada skala pengukuran kualitatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kehandalan kelompok komunitas penyelamatan air waduk Sermo termasuk kategori sedang dengan bobot 59,74%. Kehandalan tertinggi adalah aspek sosial kelembagaan dengan bobot 70%, kemudian diikuti aspek ekonomi dengan bobot 58,12%, dan terendah adalah aspek lingkungan dengan bobot 51,11%. Hasil pemetaan keandalan tersebut, dapat digunakan acuan untuk menetapkan program peningkatan kemandirian pada umumnya, dan khususnya komunitas kelompok penyelamatan air waduk Sermo oleh pemerintah.

Kata kunci: Komunitas Penyelamatan Air, Waduk Sermo, Sosial-kelembagaan, Sosial Ekonomi, Lingkungan.

PENDAHULUAN

Masalah pangan berhubungan dengan ketersediaan, pelaku, penghasil dan pengolah, kebijakan pangan, dan marjin usaha tani yang sangat kecil (Kem-Ristek, 2006:4). Oleh karena itu, penanganan masalah pangan Nasional tidak dapat terlepas dari penyediaan infrastruktur bidang Pekerjaan Umum. Penyediaan infrastruktur sub bidang sumberdaya air ditujukan untuk meningkatkan perekonomian dan daya saing Nasional. Namun, pembangunan infrastruktur memerlukan lahan milik maupun lahan garapan masyarakat. Oleh karena itu, tidak semua masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dalam menikmati hasil hasil pembangunan. Masyarakat yang lahannya harus dialih fungsikan menjadi lahan untuk infrastruktur seperti Waduk Sermo, harus berjuang untuk tetap dapat hidup dari sisa lahan dan waduk yang telah dibangun. Bahkan masyarakat di kawasan waduk diberi tanggung jawab tambahan untuk memelihara waduk dari ancaman kematian akibat pendangkalan dan kerusakan lingkungan lainnya di sekitar waduk.

Perubahan iklim global yang menimbulkan pemanasan global memperparah kondisi penyediaan air waduk. Dari tahun ketahun kekeringan dirasakan semakin meluas, seolah musim telah berubah, curah hujan yang turun semakin berkurang, sehingga keberadaan air semakin berkurang di Indonesia, dan tanpa kecuali di sekitar Waduk Sermo. Menghadapi fenomena global tersebut, adaptasi dan mitigasi adalah pendekatan yang dinilai tepat. Mitigasi melalui program penyelamatan air perlu segera dilaksanakan. Namun, program tersebut harus dilaksanakan secara menyeluruh dan terintegrasi dengan melibatkan seluruh pemilik kepentingan, antar sektor dan antar wilayah administratif yang mencakup semua bidang pengelolaan yaitu konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian daya rusak air (AIR,2008:24). Penyelamatan air dapat dilakukan melalui konsep partisipasi, dan kemitraan serta peningkatan kemandirian masyarakat. Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air (GNKPA) adalah salah satu jawaban untuk mengantisipasi semakin meluasnya masalah kelangkaan air (PerPres 28,2005). Secara teori, peran dan kemandirian serta kehandalan masyarakat dapat terjadi melalui interaksi sosial, karena tanpa adanya interaksi sosial, maka tidak mungkin ada kehidupan bersama. Bertemunya orang per orang tanpa adanya pergaulan juga tidak akan membentuk kehidupan bersama (Soyomukti Nuraini, 2010:316-385).

Permasalahannya adalah bagaimana mengukur keandalan suatu kelompok komunitas yang telah lahir dikalangan masyarakat?, faktor-faktor apa saja yang telah menjadi kekuatan sehingga dapat dikembangkan dan didayagunakan untuk penyelamatan air?. Makalah ini membahas hasil pemetaan keandalan kelompok komunitas penyelamatan air di tingkat desa yang berada disekitar waduk Sermo, kabupaten Kulonprogo, propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini telah dilakukan pada tahun 2010 dengan mengambil lokasi desa Hargowilis, kecamatan Kokap, Kabupaten Kulonprogo, propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Alasan pemilihan lokasi tersebut adalah (i) Waduk Sermo berada disekitar kawasan permukiman yang sudah sejak dulu ada sehingga rawan lingkungan dan rawan sosial, (ii) kehidupan masyarakat desa hargowilis sangat tergantung pada lahan dan waduk, tetapi masih rendah pengetahuannya untuk memanfaatkan potensi waduk, (iii) sudah ada program konservasi air dilahan sekitar waduk tetapi belum ada sistem pemeliharaan dan pemanfaatan yang kolaboratif.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang dilakukan melalui penelitian survey. Pengumpulan data dilakukan dengan metode diskusi kelompok secara terarah (Focus Group Discussion/FGD) yang melibatkan sebanyak 6 (enam) dari 9 (sembilan) pengurus kelompok komunitas yang telah operasional di desa Hargowilis. Sebanyak 3 (tiga) kelompok mewakili kelompok yang baru dibentuk pasca pembangunan waduk, sedangkan 3 (tiga) kelompok lainnya mewakili kelompok yang telah ada sebelum waduk dibangun.

Topik diskusi diarahkan pada 3 (tiga) aspek yaitu aspek sosial kelembagaan, aspek ekonomi, dan aspek lingkungan. Aspek sosial kelembagaan dibagi menjadi 6 (enam) sub topik atau parameter yaitu (i) Modal Sosial, (ii) dinamika lembaga, (iii) potensi lembaga, (iv) kekuatan sosial, dan (vi) ketahanan sosial. Aspek ekonomi dibagi menjadi 7 (tujuh) sub topik (parameter)

Data selama proses diskusi dicatat oleh 3 (tiga) peneliti dan hasilnya dirata-ratakan. Penilaian awal terhadap kondisi keandalan kelompok yang tercermin dari penjelasan para pengurus kelompok dilakukan secara kualitatif yaitu kategori kurang, sedang dan baik.

Analisis dilakukan secara deskriptif kuantitatif dengan memberi skala=1 untuk kategori kurang, skala=2 untuk kategori sedang dan skala=3 untuk kategori baik. Perhitungan dilakukan dengan mengalikan jumlah kategori masing masing aspek terhadap skala yang ditetapkan. Hasilnya dijumlahkan dan dirata-ratakan dan dibobotan dalam persentase.

Interpretasi dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara analitis terhadap hasil perhitungan dan sistetis dengan memadukan hasil hasil analisis. Kriteria penilaian keandalan dilakukan secara kualitatif dengan mengacu pada hasil analisis dengan membagi kembali menjadi 3 (tiga) kategori yaitu (i) kurang = < 33,3%, (ii) cukup baik = 33,4-66,6%, dan (iii) baik = > 66,7%

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyajian dan Analisis Hasil FGD

Diskusi terarah (*focus Group Discussion/FGD*) dihadiri oleh 6 (enam) dari 9 (sembilan) pengurus kelompok komunitas penyelamatan air (KKPA) yang ada di kawasan Waduk Sermo. Hasilnya dirangkum pada matrik dua sisi yang terdiri dari (18 x 6) sel = 108 (seratus delapan) sel matrik. Dari keseratus delapan sel matrik tersebut terdapat 9 (sembilan) sel yang tidak relevan untuk diisi yaitu 3 (tiga) sel pada aspek ekonomidan 6 (enam) sel pada aspek lingkungan. Dengan demikian, data keandalan

aspek sosial kelembagaan tertera didalam 30 (tiga puluh) sel matrik, aspek ekonomi 42 (empat puluh dua) sel matrik, dan aspek lingkungan 36 (tiga puluh enam) sel matrik sehingga jumlah sel seluruhnya yang terisi adalah 99 sel matrik.

Sebagaimana tertera pada Tabel-1, ditinjau dari isian sel matrik, sebanyak 15 (*lima belas*) dari 99 (*sembilan puluh sembilan*) sel matrik atau 15,15% dari total bernotasi baik (B). Sel matrik yang bernotasi sedang (S) sebanyak 47 (*empat puluh tujuh*) sel matrik atau 47,47% dari total, sedangkan sisanya sebanyak 37 (*tiga puluh tujuh*) sel matrik atau 37,37% dari total bernotasi kurang (K).

Tabel-1 Data dan Analisis Kehandalan KKPA Waduk Sermo

Aspek/Parameter	Kelompok Komunitas Eksisting						Nilai	%
	Nelayan	Parkir	Prahu	Tani-1	Tani-2	Tani-3		
A. SOSIAL KELEMBAGAAN							0,69	68,89%
1. Modal Sosial	K	K	K	S	B	S	0,11	11,11%
2. Dinamika Lembaga	K	K	K	S	S	S	0,10	10,00%
3. Potensi Lembaga	S	S	S	S	B	S	0,14	14,44%
4. Kekuatan Sosial	S	S	S	S	B	S	0,14	14,44%
5. Kestabilan Sosial	S	B	B	B	B	B	0,19	18,89%
B. EKONOMI							0,58	58,12%
1. Sumber kehidupan	S	B	K	S	B	S	0,11	11,11%
2. Kecukupan income	S	S	K	S	B	S	0,10	10,26%
3. Variasi usaha	K	K	K	S	S	S	0,08	7,69%
4. Pemanfaatan Wil. Waduk				S	B	S	0,06	5,98%
5. Jaminan Sosek	K	K	K	S	S	S	0,08	7,69%
6. Lembaga Ekonomi	K	K	K	K	K	K	0,05	5,13%
7. Pemahaman Masy.	K	S	S	S	B	S	0,10	10,26%
C. LINGKUNGAN							0,51	51,11%
1. Program Konservasi	K	K	K	S	B	S	0,11	11,11%
2. RKT D	K	K	K	S	S	S	0,10	10,00%
3. Infra Teknis Vegetatif				S	S	S	0,07	6,67%
4. Konsistensi Tindakan	K	K	K	K	S	K	0,08	7,78%
5. Integrasi Program	K	K	K	K	S	K	0,08	7,78%
6. Vegetasi Ekonomi				S	B	S	0,08	7,78%
Nilai Kumulatif	20	43	63	95	137	169	0,59	59,37%
Bobot KKPA	11,83%	13,61%	11,83%	18,93%	24,85%	18,93%		

Catatan : B (Besar), S (Sedang), K (Kecil)

Sumber: Pus Sosekling, 2010 (diolah)

Apabila notasi B diberi nilai = 3, notasi C diberi nilai = 2, dan notasi C diberi nilai = 1, maka total nilai keandalan kelompok komunitas pemanfaatan air waduk Sermo diperhitungkan sebesar $(15 \times 3) + (47 \times 2) + (37 \times 1) = 176$ poin dari maksimum $99 \times 3 = 297$ point atau setara dengan $176/297 \times 100 = 59,26\%$ dari 100% (kategori cukup baik). Walaupun demikian, diperlukan peningkatan keandalan sebesar 40,74%.

Perkuatan aspek ekonomi meliputi (i) variasi usaha, (ii) pemanfaatan wilayah waduk, (iii) jaminan sosial ekonomi, dan lembaga ekonomi. Perkuatan disektor lingkungan meliputi (i) penambahan infrastruktur sipil teknis vegetatif, (ii) peningkatan konsistensi tindakan antara perencanaan dengan realisasi, (iii) integrasi program lingkungan dengan program pembangunan lainnya, (iv) penanaman vegetasi yang bernilai ekonomis tetapi ramah lingkungan. Prioritas perkuatan diarahkan pada pengembangan lembaga ekonomi, pemanfaatan wilayah waduk, dan penambahan infrastruktur sipil teknis vegetatif.

Keandalan Sosial-Kelembagaan

Ditinjau dari parameter modal sosial KKPA-Tani-2 (Sidowayah) yang telah terbangun termasuk kategori baik. Dua kelompok lainnya yaitu KKPA-Tani-3 (Tegal Rejo) dan KKPA Tani-1 (Sermo Tengah) memiliki modal sosial kategori sedang, dan 3 (tiga) kelompok lainnya memiliki modal sosial kategori kurang yaitu KKPA Nelayan, Perahu dan Parkir. Masih kurangnya modal sosial dari ketiga kelompok non tani tersebut, karena usianya relatif masih muda bila dibandingkan dengan kelompok tani yang sudah terbentuk sebelum waduk Sermo dibangun, sedangkan kelompok non tani baru dibentuk setelah waduk dioperasikan sejak tahun 1992.

Ditinjau dari dinamika kelembagaan organisasi, kelompok tani lebih dinamis bila dibandingkan dengan kelompok non tani. Hal itu berarti bahwa kepemilikan AD/ART, kepengurusan, program kerja, dan sumber dana kelompok tani lebih baik bila dibandingkan dengan kelompok non tani. Hal ini dapat dimaklumi karena usia kelompok non tani relatif masih muda. Kelompok non tani dibentuk setelah waduk dioperasikan, sedangkan kelompok tani sudah ada sejak sebelum waduk Sermo dibangun.

Ditinjau dari potensi lembaga, intensitas interaksi sosial dengan nilai kegotong royongan, paguyuban dan patembayan, KKPA Tani-2 (Sidowayah) dan KKPA Parkir lebih baik daripada keempat KKPA lainnya. Hal itu memberi indikasi bahwa intensitas pertemuan rutin kelompok, frekuensi kegiatan kegotong-royongan, dan keberadaan maupun peran pimpinan dalam melakukan pelestarian lingkungan lebih sering baik dari keempat kelompok lainnya.

Ditinjau dari standar (baku) dan integritas lembaga, pada umumnya semua kelompok sudah termasuk kategori sedang, bahkan KKPA Tani-2 (Sidowayah) termasuk kategori baik. Hal itu memberi indikasi bahwa keaktifan maupun kemampuan dalam menjalankan kegiatan kelompok yang bersifat baku (standar) sudah teruji integritasnya. Kegiatan kelompok yang bersifat baku tersebut antara lain adalah pertemuan rutin, pemahaman maupun penerapan teknologi yang diperkenalkan, peningkatan potensi, solidaritas, hubungan internal, dan penyelesaian penyelesaian masalah lapangan yang dihadapi.

Ditinjau dari aspek kestabilan sosial atau potensi benih benih konflik sosial vertikal maupun horizontal, hanya ada satu kelompok yang sedikit memiliki potensi konflik antar anggota. Kelompok tersebut adalah KKPA-Nelayan, sedangkan kelompok lainnya tidak ada benih benih konflik sosial diantara para anggotanya. Adanya benih konflik di KKPA-Nelayan, terkait dengan usaha ikan dan penyaluran bantuan pembenihan ikan dari pemerintah kota maupun pendonor lainnya. Di kelompok nelayan tersebut ada anggota yang sering mengambil jalur pintas untuk memperoleh keuntungan dari penyaluran benih maupun penjualan hasil tangkapan ikan ke pengusaha luar waduk Sermo.

Dari ke-enam kelompok yang menyampaikan aspirasinya dalam diskusi kelompok terarah, kehandalan sosial kelembagaan KKPA-Tani-2 (Sidowayah) termasuk kategori paling handal atau menempati peringkat pertama. Peringkat kedua ditempati secara bersama sama oleh KKP-Tani-3 (Tegal Rejo) dan KKTA-1 (Sermo Tengah). Peringkat kehandalan ketiga ditempati oleh KKPA-Parkir. Peringkat keempat ditempati secara bersama sama oleh KKPA-Perahu, dan peringkat kelima atau terakhir ditempati KKPA-Nelayan.

Total nilai keandalan sosial kelembagaan KKPA waduk Sermo diperhitungkan sebesar $(9 \times 3) + (15 \times 2) + (6 \times 1) = 63$ point dari 8 maksimum $30 \times 3 = 90$ point atau setara dengan $63/90 \times 100\% = 68,89\%$ (70%) atau termasuk kategori baik. Dengan demikian, besarnya upaya perbaikan kapasitas atau peningkatan KKPA Waduk Sermo di sektor sosial kelembagaan adalah 30%. Faktor-faktor kunci kehandalan sosial kelembagaan yang memerlukan perbaikan adalah modal sosial, dan dinamika lembaga, khususnya untuk KKPA non tani.

Keandalan Ekonomi

Mata pencaharian dan penghasilan serta kecukupan pendapatan (*income*) KKPA-Tani-2 (Sidowayah) dan KKPA Parkir termasuk kategori memadai. Mata pencaharian dan penghasilan KKPA-Tani-3 (Tegal Rejo), maupun KKPA Tani-1 (Sermo Tengah), dan KKPA-Nelayan termasuk kategori cukup memadai untuk ukuran

setempat. Namun, mata pencaharian dan penghasilan serta kecukupan pendapatan (*income*) KKPA-Perahu termasuk kategori kurang.

Dusun sidowayah terkena genangan seluas sepertiga dari luas administratif dusun tersebut, sehingga lahan yang dapat digarap masih luas bila dibandingkan dengan dusun lainnya. Selain itu, biaya operasional peralatan kerja petani, pada umumnya lebih kecil bila dibandingkan dengan hasil panen yang diperoleh dari pengelolaan lahan pekarangan milik petani, dan lahan lahan sabuk hijau milik pemerintah. Hal itu mengindikasikan bahwa harta benda dan penerimaan kelompok tani Sidowayah lebih besar bila dibandingkan dengan kelompok tani Tegal Rejo dan Sermo Tengah yang sebagian besar lahannya tergenang waduk.

Pengelolaan lahan lahan parkir milik pemerintah untuk para wisatawan yang mengunjungi waduk Sermo tidak banyak memerlukan peralatan kerja. Selain itu, pemeliharaan rambu rambu parkir dan bangunan pos penjagaan yang disediakan pemerintah daerah juga relatif ringan. Porsi retribusi yang dipungut oleh pemerintah daerah terhadap tarif parkir sebesar 20% membuka peluang pengelola jasa parkir untuk memperoleh *income* yang memadai.

Kelompok nelayan memerlukan jaring dan perahu sampan untuk menangkap ikan. Sementara itu, bibit ikan banyak berasal dari bantuan pemerintah daerah, dan juga yang tumbuh sendiri secara alami. Harga ikan, juga relatif baik dipasaran. Oleh karena itu, kelompok petani ikan berpeluang besar untuk memperoleh pendapatan yang memadai.

Berbeda dengan kelompok lainnya, penerimaan jasa transportasi oleh kelompok perahu tidak sebaik kelompok lainnya. Penerimaan dari jasa perahu, belum cukup untuk investasi perahu baru untuk menggantikan perahu sumbangan dari pemerintah. Biaya operasional terkendala oleh mahalnya bahan bakar minyak solar meskipun bersubsidi. Selain itu, suku cadang perahu selain sulit diperoleh, harganya juga relatif mahal.

Ditinjau dari aspek variasi usaha dan pemanfaatan wilayah waduk, kelompok tani berpeluang lebih besar bila dibandingkan dengan kelompok non tani. Usaha pengelolaan lahan yang telah dilakukan, selain ditanami berbagai jenis tanaman kebun rakyat, beberapa tempat sudah digunakan untuk budidaya ikan kolam. Berbeda dengan kelompok non tani, kelompok nelayan maupun kelompok perahu tidak diijinkan menggunakan keramba ikan. Pengusahaan areal pasang surut untuk kegiatan pertanian yang ramah lingkungan, belum terumuskan sehingga masih ide. Jejaring usaha hasil ikan dengan pengusaha luar kawasan waduk juga belum terbentuk. Pemanfaatan infrastruktur sipil teknis vegetatif yang dibangun di lahan

perkarangan, untuk menambah variasi usaha masih terbatas pada pengusahaan jenis tanaman rumput dan legium saja.

Ditinjau dari aspek jaminan sosial ekonomi, kelompok tani lebih terjamin bila dibandingkan dengan kelompok non tani. Jejaring pengaman ekonomi untuk kegiatan tani sudah lebih baik. Penyediaan bibit tanaman perkebunan, penyediaan pupuk, dan bahan pembasmi hama sudah relatif mudah diperoleh biladibandingkan untuk keperluan kelompok non tani. Hal tersebut terindikasi dari kasus hama setan ikan merah (*red fish devil*) di waduk Sermo yang menjadi predator ikan yang dibudidayakan di waduk, sehingga mengurangi panen secara signifikan. Ikan setan murah bisa dipanen dan diolah menjadi keripik, namun harga jualnya hanya sepertiga dari ikan budidaya lainnya. Sementara itu, biaya pengolahan ikan tersebut relatif tinggi bila dibandingkan dengan harga jualnya. Oleh karena itu, pengusahaan ikan setan merah tidak mampu menggantikan kerugian akibat berkurangnya ikan budidaya. Sampai saat ini, belum ada instansi yang mampu mengatasi hama ikan setan merah tersebut, karena belum ditemukan akar masalah munculnya hama tersebut.

Ditinjau dari aspek lembaga ekonomi, menunjukkan bahwa keberadaan dan dukungan lembaga yang ada terhadap peningkatan pendapatan (*income*) KKPA masih kurang. Hal ini memberi indikasi bahwa kelompok belum sepenuhnya memahami peran lembaga-lembaga ekonomi yang telah ada. Kemungkinan lain, lembaga ekonomi belum mampu menggali kebutuhan komunitas kelompok yang ada. Lembaga ekonomi belum memiliki peta kondisi dan potensi KKPA yang ada, sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan belum terarah untuk memperbaiki kesejahteraan KKPA. Sementara itu, fasilitator yang tersedia untuk menjembatani program lembaga ekonomi dengan KKPA hanya tersedia satu orang tenaga LSM untuk semua sektor. Seharusnya, kondisi ideal adalah tersedianya satu fasilitator untuk setiap sektor.

Ditinjau dari aspek pemahaman masyarakat, hanya KKPA-Tani Sidowayah yang memiliki pemahaman yang baik terhadap aspek produktifitas, prestasi, dan investasi. Hal tersebut dapat diidentifikasi dari pandangan KKPA Tani-2 (Sidowayah) bahwa kemampuan kelompok untuk menghasilkan pendapatan (*income*) untuk setiap keluarga mencerminkan produktifitas anggota. Besarnya produktivitas yang berasal dari pengelolaan kebun rakyat dan pengelolaan sabuk hijau merupakan prestasi dalam konservasi atau pengawetan sumberdaya air. Pengawetan sumberdaya air dan sumberdaya lahan di daerah aliran waduk Sermo, adalah investasi yang akan diwariskan kepada anak cucu atau generasi penerus anggota KKPA-Tani Sidowayah.

Total nilai kehandalan ekonomi kelembagaan KKPA waduk Sermo diperhitungkan sebesar $(5 \times 3) + (19 \times 2) + (15 \times 1) = 68$ poin dari maksimum $39 \times 3 = 117$ point atau setara dengan $68/117 \times 100 = 58,12\%$ dari 100% (kategori cukup baik).

Dengan demikian, besarnya upaya perbaikan kapasitas atau peningkatan KKPA Waduk Sermo di sektor ekonomi adalah 41,88%. Faktor faktor kunci kehandalan ekonomi KKPA yang memerlukan perbaikan adalah variasi usaha, jaminan sosek untuk KKPA non tani (Nelayan, Parkir, perahu), dan dukungan lembaga lembaga ekonomikepada seluruh KKPA yang ada.

Keandalan Lingkungan

Ditinjau dari kemampuan menyusun program konservasi, KKPA-Tani-2 (Sidowayah) termasuk kategori baik. KKPA Tani-3 (Tegal Rejo) dan KKPA Tani-1 (Sermo Tengah) termasuk kategori sedang. Kelompok non tani yaitu KKPA Nelayan, Perahu dan parkir termasuk kategori kurang.

Kemampuan menyusun program konservasi tersebut tentunya mencerminkan belum optimalnya pembinaan yang dilakukan pemerintah kabupaten. Salah satu faktor penentu keberhasilan pembinaan tersebut adalah kurangnya pendampingan yang diberikan sektor. Pendampingan yang hanya dilakukan oleh seorang fasilitator untuk semua bidang, tentunya tidak efektif karena kompetensi seseorang pada dasarnya terbatas pada bidang tertentu saja.

Ditinjau dari aspek penyusunan Rencana Kerja Tingkat Daerah (RKTD), ketiga kelompok tani termasuk kategori sedang, dan ketiga kelompok non tani termasuk kategori kurang. Hal itu berarti bahwa didalam proses penyusunan RKTD yang dilakukan kelompok tani, sudah menjadi satu kesatuan dengan proses dan tahapan yang diatur dalam musyawarah perencanaan dan pembangunan (Musrenbang). Sebaliknya, proses penyusunan RKTD yang dilakukan kelompok non tani belum mengikuti tahapan proses Musrenbang yang berlaku. Hal ini mengindikasikan usulan kegiatan konservasi terkait dengan keberlanjutan kegiatan nelayan, perahu, dan parkir belum tergal. Penanganan masalah hama ikan setan merah (*red devil fish*), seharusnya dapat diusulkan sebagai salah satu program konservasi, dan kegiatan kegiatannya diusulkan melalui mekanisme Musrenbang. Investasi ulang terhadap sarana perahu seharusnya juga menjadi bagian program konservasi. Demikian pula halnya dengan pengadaan prasarana dan sarana keamanan parkir dapat diusulkan sebagai bagian konservasi.

Ditinjau dari aspek infrastruktur sipil teknis vegetatif, kemampuan ketiga kelompok tani dalam menggali kegiatan kegiatan yang berhubungan dengan pendayagunaan infrastruktur sipil vegetatif yang ada termasuk kategori sedang.

Namun, kemampuan ketiga kelompok non tani masih kurang dalam pendayagunaan infrastruktur vegetatif. Tanaman tanaman yang terdapat di areal sabuk hijau, dan berbatasan dengan areal parkir atau areal pasang surut seharusnya dapat didayagunakan oleh kelompok non tani tersebut. Kelompok non tani, sebelum lahannya tergenang adalah petani. Oleh karena itu, seharusnya tidak mengalami kesulitan untuk mengelola tanaman yang ada di bibir waduk, dan diareal parkir.

Ditinjau dari aspek konsistensi tindakan untuk mengimplementasikan kegiatan kegiatan yang terdapat dalam RKTd, hanya KKPA-tani Sidowayah yang cukup konsisten. Kelompok tani lainnya masih kurang konsisten atau kurang aktif melaksanakan RKTd, sedangkan kelompok non tani memang belum mempunyai RKTd.

Dari aspek integrasi program, kondisinya sama dengan aspek konsistensi pelaksanaan tindakan RKTd. Meskipun belum optimum, keaktifan dalam melakukan identifikasi dan negosiasi dengan pemangku kepentingan hanya dilakukan oleh KKPA-Tani Sidowayah. Hal tersebut, mencerminkan belum cukup besarnya kepedulian dari pemanfaat air di hilir waduk sermo terhadap upaya pelestarian air yang dilakukan oleh dibagian hulunya.

Total nilai kehandalan lingkungan KKPA waduk Sermo di sektor lingkungan diperhitungkan sebesar $(2 \times 3) + (12 \times 2) + (16 \times 1) = 46$ poin dari maksimum $30 \times 3 = 90$ point atau setara dengan $46/90 \times 100 = 51,11\%$ dari 100% (kategori cukup baik)

Dengan demikian, besarnya upaya perbaikan kapasitas atau peningkatan KKPA Waduk Sermo di sektor lingkungan adalah sebesar 48,89%. Faktor faktor kunci kehandalan KKPA di sektor lingkungan yang memerlukan perbaikan adalah kemampuan membuat program konservasi, menyusun dan melaksanakan RKTd secara konsisten dan keaktifan dalam mengidentifikasi dan bernegosiasi dengan pemangku kepentingan dalam meningkatkan kualitas pelestarian sumberdaya air.

KESIMPULAN

Kehandalan sosial kelembagaan kelompok komunitas penyelamatan air (KKPA) menempati peringkat pertama dengan bobot 68,89% (70%), yang diikuti dengan kehandalan ekonomi dengan bobot 58,12%, dan kelembagaan lingkungan dengan bobot 51,11%. Secara keseluruhan, kehandalan KKPA waduk Sermo termasuk kategori sedang dengan bobot 59,74%. Perkuatan keandalan pada aspek ekonomi dan lingkungan diprioritaskan pada pemanfaatan wilayah waduk, pengembangan lembaga ekonomi dan penambahan infrastruktur sipil teknis vegetatif.

DAFTAR PUSTAKA

- [Kem Ristek], Kementerian Riset dan Teknologi, 2006, Buku Putih Indonesia 2005-2025, Penelitian dan Pengembangan serta Penerapan Teknologi Bidang Ketahanan Pangan, 2006:4
- Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 28 tahun 2005 tentang Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air (GNKPA)
- [Pus SOSEKLING], Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan, 2010, Peningkatan Sosial, Ekonomi, Budaya Masyarakat dalam Penyelamatan Air , dan Pengaruh Pembangunan Jalan Tol, Laporan Akhir Penelitian.
- Soyomukti Nuraini, 2010, *Pengantar Sosiologi, Dasar Analisis Teori & Pendekatan menuju analisis masalah-masalah sosial, perubahan sosial, dan kajian strategis*, AR-RUZZ MEDIA, Yogyakarta, 2010:385.

KEMBALI KE DAFTAR ISI